

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Encyclopedia Nurcholish Madjid

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Book chapter
Authors	Munawar-Rachman, Budhy
Publisher	Mizan
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-09 16:52:17
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/181251



VALUE JUDGEMENT PENGUNAAN KEKAYAAN

Saat ini banyak buku dan karya yang dibuat oleh orang-orang yang mencoba menjelaskan cara-cara mewujudkan keadilan sosial itu. Tetapi, George Bernard Shaw menasihatkan agar kita tidak membaca sebaris pun buku-buku dan karangan-karangan itu, sebelum kita mendiskusikan dengan kawan-kawan terdekat kita sendiri. Kemudian mengambil kesimpulan sebaik mungkin tentang bagaimana seharusnya kekayaan nasional dibagi di antara seluruh rakyat di dalam suatu negara beradab dan terhormat.

Hal demikian itu terjadi karena setiap pikiran tentang pelaksanaan cita-cita itu tidak lebih daripada pikiran. Dan pikiran-pikiran orang-orang lain belum tentu lebih baik daripada pikiran-pikiran kita sendiri, dan begitu pula sebaliknya. Berapakah kita harus memperoleh bagian dari harta kekayaan yang ada ini, dan berapa pula yang harus

diperoleh oleh tetangga kita? Bagaimana jawaban Anda sendiri?

Karena menjawab pertanyaan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, maka kita harus terlebih dahulu membersihkan benak kita dari gambaran yang tertanam sejak masa kanak-kanak, bahwa lembaga-lembaga di mana kita hidup sekarang ini, termasuk cara-cara yang sah dalam membagikan pendapatan dan mengizinkan seseorang memiliki harta, adalah sesuatu yang memang sudah semestinya terjadi secara alamiah sebagaimana halnya udara di sekeliling kita. Hal itu tidaklah demikian, karena pola-pola yang melembaga itu kita dapati di mana-mana—kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya bahwa hal-hal itu memang telah ada dan harus ada untuk selama-lamanya—timbul dengan sendirinya.

Hal ini merupakan suatu kekeliruan yang berbahaya. Lembaga-lembaga itu sepenuhnya dapat diubah. Dan memang, mereka berada dalam proses perubahan

terus-menerus sepanjang masa. Banyak sekali dari pola-pola itu yang akan tidak diikuti atau ditaati oleh “orang-orang baik” sekalipun, jika tidak ada polisi yang dapat segera dihubungi, dan ancaman hukuman penjara yang selalu terbayang.

Salah satu hal yang dapat kita pikirkan perubahannya ialah pola-pola dan *value judgement* tentang bagaimana kita menggunakan kekayaan kita. Sekalipun, dan justru, kekayaan itu adalah milik sah kita sendiri. Sebagai contoh sederhana kita memiliki kekayaan sebesar seribu rupiah (di sini harus dianggap bahwa mempunyai seribu rupiah sudah termasuk kaya), maka menurut rasa keadilan sosial, kekayaan sebesar itu dapatkah kita pergunakan untuk belanja kita sendiri dan keluarga kita, seluruhnya atau kurang dari seribu rupiah? Atau bagaimana jika suatu cara lain dapat diperoleh?

Di atas telah disebutkan tentang *value judgement*. Memang, suatu pola penggunaan harta menyangkut tata nilai seseorang. Hal itu tidak selalu berhubungan dengan persoalan benar-salah, tetapi terutama menyangkut rasa tata hormat dan tidak terhormat, bahagia dan tidak bahagia. Umpamanya, jika kita berpandangan bahwa kehormatan dan kebahagiaan terletak pada kekayaan yang tampak dan dapat dilihat orang lain (lebih-lebih jika

mampu menerbitkan rasa iri hati pada mereka), maka sudah tentu pola penggunaan harta yang kita anut ialah pola penggunaan harta yang maksimal. Bahkan mungkin kita akan berusaha menunjukkan kekayaan lebih dari kemampuan kita sendiri, sehingga pengeluaran menjadi lebih besar daripada pemasukan, sekalipun menurut ukuran masyarakat, sebetulnya kita termasuk kaya dan mampu. Pola penggunaan harta yang amat konsumtif itu, oleh para ahli, disebut (dalam istilah asing) *demonstration effect*. Mereka menyinalir bahwa hal itu merupakan halangan terbesar dalam usaha mewujudkan masyarakat “adil dan makmur”. Dan memang, kita tidak sulit untuk mengetahui ketidakbenaran pola itu, sebab tidak sesuai dengan “hati nurani” kita sendiri. Sayangnya, dalam masyarakat terdapat kecenderungan yang mendorong semakin kuatnya pola *demonstration effect* itu, khususnya bagi mereka yang untuk pertama kalinya menikmati apa artinya merdeka yang berupa keleluasaan dan fasilitas-fasilitas. Dan juga anak muda memahami sinyalemen para ahli itu, karena *demonstration effect* akan mendorong seseorang untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain.

Tetapi, tidakkah berarti bahwa hal sebaliknya sama sekali adalah

baik. Sebab kepelitan, dalam bentuknya yang ekstrem, tidak kurang berbahayanya bagi cita-cita masyarakat adil dan makmur. Jika kita pelit pada diri sendiri, tentunya kita akan lebih pelit lagi kepada orang-orang lain khususnya kepada pihak yang paling memerlukan perhatian dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, yaitu kaum tak mampu. Dan usaha-usaha di bidang sosial, jika semua orang kaya menganut pola ini, akan tidak berjalan, seperti panti-panti asuhan, rumah-rumah perawatan

orang sakit, wisma penyantunan orang-orang cacat, dan lain-lain. Dengan demikian, kekayaan yang ada di tangan orang-orang penganut *demonstration effect* akan kehilangan fungsi sosialnya, karena habis untuk menuruti nafsu pamernya sendiri. Begitu pula, harta itu pun akan kehilangan fungsi sosialnya di tangan orang-orang pelit, karena harta itu disimpannya rapat-rapat untuk memuaskan nafsu menghitung-hitung harta dan menumpuk-numpuknya, seakan-akan ia akan hidup kekal dengan hartanya itu.



VERBALISME

Kalau kita perhatikan materi ujian olah raga anak-anak, yang dipertanyakan justru, misalnya, berapa panjang lapangan badminton, berapa tinggi netnya, padahal anak-anak itu tidak pernah bermain badminton, dan yang berolahraga permainan tersebut justru tidak pernah mengetahui masalah itu. Demikianlah penyakit verbalisme yang sangat umum kepada kita. Karena itu, saya (dulu) menentang P4, karena

program ini mendidik kita bersikap verbalistik. Yang disebut verbalisme ialah *kita merasa berbuat karena mengatakan*. Maka, pada zaman Pak Harto yang paling Pancasila ialah yang tiap hari bicara Pancasila. Saya sendiri tidak pernah mengikuti P4, karena saya menganggapnya verbalisme. Kemudian ada perbandingan dengan anak saya yang pernah ikut ke Chicago. Pada saat sekolah, di sana yang disebut pelajaran olahraga ialah praktik, misalnya disuruh lari, atau apa saja, dinilai satu per satu, bukan hapalan skorsing tenis dan sebagainya. Ini verbalisme. Demikian juga dalam

soal agama, di mana kita akhirnya tertipu semua. Katanya pelajaran agama kita sudah hebat, tapi ternyata tidak pernah ada efeknya.

Memang, hal ini selalu ada kaitannya dengan tingkat kecerdasan. Maka, ada istilah *khawwâsh* (orang khusus) dan *'awwâm* (orang umum). Sejak dulu para ulama telah membagi manusia begitu. Yang *khawwâsh* langsung menuju kepada makna, sedang yang awam perlu ke simbol-simbol. Sering saya katakan bahwa simbol itu penting karena kalau tidak ada simbol hidup ini akan sulit, misalnya simbol lalu lintas. Kenapa penting, karena ia menyederhanakan persoalan.

Saya selalu bilang bahwa simbol yang paling penting dalam hidup ini adalah uang di mana sebuah kertas dikasih angka Rp 50 ribu sebagai nilai nominalnya. Dengan simbol ini [kertas bertuliskan angka 50 ribu], kalau kita ke luar rumah kita tidak perlu takut lapar dan haus, karena kalau lapar kita bisa tukarkan kertas 50 ribu itu dengan nasi. Nasi itulah intrinsiknya, sedang kertas (uangnya) adalah instrumennya. Kalau kita salah paham, yaitu seolah-olah yang simbolik itu menjadi esensi, maka kalau kita lapar kita makan uang itu. Bayangkan! Nah, terus terang saja banyak sekali orang beragama seperti itu. Simbol menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Itu palsu.

Tidak hanya palsu untuk dirinya sendiri tetapi mengecoh orang lain.

Maka, ayat “celakalah orang yang sembahyang” sebenarnya bertujuan untuk mengecek. Orang itu sembahyang. Karena sembahyang, maka secara teoretis dia pasti baik. Tapi ternyata dia jahat. Itu *'kan* mengecoh. Dan itulah yang disebut munafik. Tapi ini persoalan kita semua. Tidak perlu menunjuk siapa-siapa. Kita harus introspeksi dan masing-masing berusaha untuk memperbarui diri sendiri, seperti pesan Nabi, *ibda' bi nafsik—mulailah dari dirimu sendiri!*



VESTED INTEREST

Kebebasan ruhani tidak dapat dipahami kecuali dalam konteks pembebasannya dari kungkungan jasmani. Dalam suatu ungkapan yang sudah sangat baku dan luas dikenal, “Kebebasan ruhani ialah pertamanya dengan mengalahkan hawa nafsu.” Istilah “hawa nafsu” itu sendiri berasal dari kata-kata Arab *hawâ al-nafs* yang berarti “keinginan diri-sendiri”. Dalam bahasa kontemporer, hawa nafsu sejajar dengan kata-kata dalam bahasa Inggris *vested interest*. Penting sekali dimengerti bahwa hawa nafsu atau *vested interest* itu dapat sangat membelenggu manusia, seperti dimaksudkan dalam ungkapan “*tyranny of vested interest*”.

